

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah.

Pemuda dan Organisasi kepemudaan seringkali menjadi tema bahasan yang menarik untuk diteliti dari masa ke masa. Kajiannya selalu multiperspektif selalu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih sebagai sebuah fenomena sosial. Dalam hal ini, kepemudaan sering kali dipandang sebagai sebuah gerakan sosial dengan menempatkan peran pemuda sebagai bagian dari *Control Sosial* maupun *Sosial Engineering* yang nyatanya diskursus tersebut terus berkembang dalam berbagai dimensi kehidupan.

Konstruksi sosial dan ilmiah dalam bidang kepemudaan cenderung memandang kepemudaan dengan berbagai macam pendekatan seperti kepemudaan sebagai transisi, kepemudaan sebagai identitas, kepemudaan sebagai aksi, kepemudaan sebagai praktik budaya dan pemuda sebagai pencipta budaya.<sup>1</sup> Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, dengan proporsi muslim yaitu 87% dari total penduduk Indonesia. Menariknya dengan jumlah yang signifikan tersebut berbagai media internasional memuji islam Indonesia sebagai potret ideal masyarakat muslim.

Namun sekitar tahun 2011 Martin Van Bruinessen mengulas kembali label islam Indonesia yang pernah disematkan oleh *Newsweek* salah satu media massa ternama berbasis di Amerika Serikat pada tahun 1996, Menurut Martin gerakan islam Indonesia yang semula identik dengan visi kebangsaan dan kemanusiaan,

---

<sup>1</sup> Jones, G, Youth, 2009, Cambridge: Polity Press hlm 58

menjadi gerakan yang cenderung lebih politis dan partisan.<sup>2</sup> Pernyataan tersebut sebetulnya tidaklah aneh bagi penulis, karena sejatinya relasi agama dan politik saling berkelindan dan memang memiliki hubungan yang erat.

Organisasi kepemudaan berperan sebagai wahana pendidikan politik bagi para pemuda, oleh karena itu pembangunan di bidang kepemudaan merupakan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan dari sasaran pembangunan manusia. Organisasi kepemudaan sejatinya sebagai wadah berhimpun yang memungkinkan munculnya bentuk kesalehan yang tidak biasa dan nontradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Johan Huizinga yang menggambarkan aktivitas kepemudaan dalam budaya anak muda, Menurut Huizinga, para pemuda bermain adalah ruang di luar kehidupan "nyata" yang memungkinkan orang untuk menerapkan gagasan ideal mereka tentang masyarakat, yang kemudian dapat secara dialektis membentuk kembali kehidupan "nyata". Dampak improvisasi religius kaum muda terhadap agama dan politik di Indonesia kontemporer. Oleh karena itu, peran pemuda sebagai perantara budaya agama yang penting.<sup>3</sup>

Perubahan dan kondisi kepemudaan menjadi salah satu faktor penentu peranan masyarakat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial keagamaan dikalangan kepemudaan kedepan. Sebab ragam persoalan yang timbul ditengah-tengah masyarakat kemudian bermuara pada konflik atas nama agama, biasanya tidak hanya melibatkan antar umat beragama saja, melainkan juga melanda intra umat beragama, yang selalu ditandai dengan diskriminasi terhadap perbedaan aliran keagamaan tertentu antara pihak yang satu dengan lainnya.

---

<sup>2</sup> Subhan setowara dkk, Muslim Melinial (Catatan & Kisah Wow Muslim Zaman Now) 2018, Bandung : PT Mizan Pustaka, hlm 3

<sup>3</sup> Nur Amali Ibrahim, Impovisational islam (Indonesian Youth in a time of possibility), 2018, New York : Cornell University Press, hlm 22

Bentuk diskriminasi dan intoleransi agama seringkali terjadi dalam berbagai bentuk, baik intra atau antar umat beragama yang mengarah pada konflik laten yang disebabkan adanya klaim tunggal kebenaran dan heroisme yang mengabaikan pihak lain. Namun yang jarang kita sadari, pemuda tampil sebagai kurir yang menyampaikan pesan-pesan keagamaan tersebut, tentu jika peran pemuda terus tampil sebagai pembawa pesan diskriminasi akan menjadi masalah besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Antisipasi dapat dilakukan dengan menanamkan benih kesadaran, pemahaman dan pengalaman tentang kerukunan umat beragama berbasis kaum muda, hal ini mengartikan bahwa pemuda merupakan generasi masa depan yang bisa menjadi pembawa pesan damai meminimalisir konflik dan menyamakan persepsi, pemahaman dan visi yang sama dalam jangka waktu yang panjang.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam kehidupan sosial keagamaan harus disikapi dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, karena perlakuan atau *treatment* yang dilakukan terhadap kepemudaan seperti pedang bermata dua. Seperti terdapat kasus dimana para pemuda dan organisasi kepemudaan yang awalnya gencar secara aktif dalam melakukan kampanye anti-maksiat kemudian beralih ke bentuk yang lebih ekstrem yaitu aksi-aksi kekerasan atau tejabak pada sikap politis yang didasarkan pada pemahaman keagamaan yang membuat ajaran agama islam malah menjadi eksklusif.

Di ruang publik Indonesia yang plural, kelompok apapun atau bahkan kelompok agama apapun tidak boleh disepelekan dan dianaktirikan. Tapi kelompok itu juga tidak boleh diistimewakan karena alasan yang sama, setebal

---

<sup>4</sup> Makrus, Peran Forum Pemuda Kerukunan umat beragama daerah istimewa Yogyakarta dalam memperkuat pradigma inklusif kaum muda, 2017, Jurnal : Walisongo, hlm 95

apapun jubah yang dikenakannya termasuk karena statusnya sebagai pemuda atau organisasi kepemudaan yang mewakili kelompok elit masyarakat yang *well educated* (berpendidikan) harus diperlakukan secara adil dan proporsional sehingga sejalan dengan harapan dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia.

Masyarakat madani (*civil society*) di Indonesia tidak akan terwujud apabila pemahaman terhadap agama dipahami tidak secara substansi dan minim perspektif malah sikap intoleran yang dikedepankan, maka permasalahan yang muncul nantinya akan menjadi masalah yang jauh lebih kompleks. Pandangan tersebut wajar karena dalam hal ini seringkali kita temukan entitas warganegara yang bertindak secara kolektif dengan cara yang sukarela, otonom dari negara dalam berbagai bentuk seperti kelompok LSM, kelompok dagang mencakup kelompok agama termasuk bisa saja organisasi kepemudaan yang mempertahankan identitas kolektif untuk mempertahankan keyakinan mereka berusaha untuk memonopoli ruang-ruang fungsional atau ruang politik dalam masyarakat, mengklaim jalan mereka sebagai satu-satunya jalan yang sah.<sup>5</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Sidney Jones yang secara spesifik menyebut contoh yang terjadi pada dua kelompok Islam 'garis-keras' yakni Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Gerakan Anti-Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS) di Cirebon, dimana para pemuda yang sebelumnya tergabung dalam gerakan Islam radikal terlibat dalam aksi-aksi kekerasan dan terorisme.<sup>6</sup> Contoh

---

<sup>5</sup> Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation," *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 3 (1994) hlm 7

<sup>6</sup> Sidney Jones, *Sisi Gelap Demokrasi (Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia)*, 2015, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina,

ekspresi-ekspresi keagamaan seperti itu mendorong sikap eksklusif dikalangan para pemuda, yang justru malah semakin membentuk identitas kepemudaan menjadi keras dan intoleran.

Seringkali ekspresi di ruang publik yang harusnya dikelola dengan baik agar tidak memojokan dan melanggar hak-hak kelompok identitas yang lain atau identitas kelompok itu sendiri malah menjadi ruang terbuka untuk menghakimi kebenaran yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Seringkali masalah etnisitas agama, ideologi bahkan isu gender (jenis kelamin) diartikulasikan secara keliru oleh para elit sebagai kepentingan-kepentingan politik. Seperti gerakan pemekaran atau daerah otonomi baru, isu-isu keadilan, pembangunan daerah, kesempatan yang sama baik laki-laki ataupun perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan masalah yang kompleks dan tidak mudah untuk dijelaskan. Lebih parahnya sikap intoleran seperti itu jelas di alamatkan kepada gerakan-gerakan islam radikal yang menggunakan kekerasan maupun nir-kekerasan sebagai modus operandinya. Hal ini dapat dimengerti karena kelompok-kelompok yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi melihat diri mereka sebagai jembatan antara negara dan warga negara.

Perkembangan politik identitas dan multikulturalisme beberapa tahun terakhir ini muncul sebagai sebuah wacana yang berkembang hangat di ruang politik Indonesia. Sekalipun Indonesia sebagai sebuah bangsa yang majemuk dan heterogen dengan keragaman suku bangsa. Kondisi multikultural adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa disangkal, kondisi multikultural ini nyatanya memang masih belum banyak dimengerti oleh masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan politik identitas, masih banyak yang salah paham dengan tema-tema ini.

Penggunaan politik identitas dalam pergulatan politik merupakan perjuangan yang mengandung sensitifitas suku, ras dan agama.

Penulis mencoba membagi dua fenomena yang muncul berkaitan dengan penggunaan politik identitas yaitu secara *statis* dan *dinamis*. Secara dinamis, sejumlah pengamat mengatakan menguatnya penggunaan politik identitas di Indonesia dimulai menjelang pilpres tahun 2019. Dimulai dengan pelaksanaan pilkada tahun 2017 yang dilaksanakan di Jakarta, dimana benturan identitas keagamaan yang dipergunakan sebagai senjata politik untuk mendeskreditkan lawan politiknya nampak jelas terlihat. Seperti diketahui, salah satu fenomena menguatnya politik identitas terjadi pada Pilkada Jakarta tahun 2017 juga telah mempertontonkan penggunaan sejumlah isu yang memuat sensitivitas agama, antara lain kasus Surah Al Maidah ayat 51 yang berujung pada mobilisasi massa mayoritas muslim yang merasa terhina atas apa yang dilakukan oleh salah satu calon tersebut., sampai beredarnya opini publik ‘Saya Muslim, saya pilih pemimpin Muslim’.<sup>7</sup>

Kondisi demokrasi model seperti ini sebenarnya memperlihatkan, hal ini disebabkan karena pemilihan umum sebagai kontestasi politik yang dilaksanakan mempertontonkan politik sentimen agama berlebihan dan sentiment kebencian. Fenomena tersebut kemudian terus bergulir ditengah-tengah masyarakat, terfragmentasi dan mengendap sedikit demi sedikit diresepsi dan dipaksakan sebagai bagian dari kultur masyarakat indonesia.

Kita ketahui bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari struktur masyarakat Indonesia yang majemuk, Kondisi kemajemukan tersebut

---

<sup>7</sup> Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin – Volume 2 No.1 Juni 2016 (<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>)

ditandai dengan dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan adama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Menurut *Cliford Geertz* masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Primordialisme sejatinya dapat berdampak negatif dan berdampak positif, dampak primordialisme anantara lain sebagai berikut :

1. Menghambat hubungan antarbangsa.
2. Menghambat proses asimilasi dan integrasi.
3. Mengurangi bahkan menghilangkan objektivitas ilmu pengetahuan.
4. Penyebab terjadinya diskriminasi (pembedaan secara sengaja terhadap golongan tertentu yang didasarkan pada ras, agama, mayoritas dan minortas masyarakat).
5. Merupakan kekuatan terpendam(potensi) terjadinya konflik antar kebudayaan suku-suku bangsa.

Sedangkan dampak positif dari primordialisme anatar lain sebagai berikut :

1. Menumbuhkan cinta tanah air.
2. Mempertinggi kesetiaan terhadap bangsa.
3. Mempertinggi semangat patriotism.

#### 4. Menjaga keutuhan dan kestabilan budaya.<sup>8</sup>

Secara statis penulis beranggapan bahwa identitas politik terbentuk secara tegak, karena pandangan terhadap dinamika sosial ditengah-tengah masyarakat selalu menyangkut pandangan politik masyarakat yang dianut secara turun menurun dan sistematis diterima secara sadar, oleh karena itu, kondisi tersebut sejatinya memberikan peluang bagi kalangan masyarakat marjinal untuk menguatkan kembali identitas perjuangan dan aspirasi politik khususnya dikalangan umat islam yang menganut solidaritas teologis yang kuat. Solidaritas teologis yang kuat diantara sesama muslim bersumber dari kehendak golongan muslim yang kultural untuk menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moralitas sosial sehingga menegaskan bahwa islam tidak perlu masuk pada wilayah-wilayah politik.<sup>9</sup>

Dalam hal ini yang menjadi fokus dan lokus dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah organisasi kepemudaan islam di kabupaten Bandung. Masyarakat kabupaten Bandung dalam kesehariannya senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai dan semangat keagamaan, disamping kuatnya kultur yang melekat dan menjadi identitas masyarakat kabupaten bandung. Sebagai masyarakat dengan mayoritas suku sunda yang menjaga nilai-nilai budayanya sekaligus religius. Masyarakat kabupaten Bandung bisa dibilang sebagai masyarakat yang religius bahwa dalam proses pembangunan manusianya selalu didasarkan pada nilai-nilai, norma dan kaidah agama khususnya islam yang diyakini dan dianut oleh mayoritas masyarakat kabupaten bandung. Secara kultural masyarakat kabupaten

---

<sup>8</sup> Dr. Bambang Rustanto. M.Hum "Masyarakat Multikultur Indonesia, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015, Hlm 38

<sup>9</sup> Masykuri Abdillah, Islam dan Demokrasi; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 (Jakarta: Prenadamedia, 2015), 225-238;.



bandung juga dapat dilihat dari nilai dan norma budaya sunda yang telah melekat dan menjadi identitas masyarakat kabupaten bandung. Moto: *Repeh Rapih Kerta raharja* berarti suatu kondisi yang menggambarkan masyarakat yang tinggal dan hidup di kabupaten Bandung senantiasa dalam keadaan aman, sejahtera dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan memperoleh rahmat Allah Swt.<sup>10</sup>

Seperti kita ketahui rekonstruksi keagamaan yang dibangun di kabupaten Bandung berlandaskan syariat islam, hipotesis tersebut memang seperti terburu-buru untuk menyatakan kondisi keagamaan masyarakat kabupaten Bandung. Namun pernyataan tersebut, bisa dimengerti jika melihat peran ulama, organisasi kemasyarakatan berbasis agama dan organisasi kepemudaan islam yang mengambil posisi yang sama dalam memobilisasi dukungan rakyat, apalagi dalam kontestasi politik. Disini bisa kita lihat bahwa agama hadir sebagai kekuatan pemersatu yang besar karena mampu menciptakan rasa identitas kultural yang kuat di tengah-tengah masyarakat, tanpa pandangan perbedaan sosial.<sup>11</sup> Dukungan dan upaya memobilisasi suara rakyat dengan menggunakan isu-isu keagamaan sejatinya sering terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini isu keagamaan yang muncul adalah kesempatan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin di ruang-ruang publik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas **AGAMA DAN POLITIK IDENTITAS (STUDI PERSEPSI ORGANISASI KEPEMUDAAN ISLAM TERHADAP PEMIMPIN PEREMPUAN DI KABUPATEN BANDUNG)**

## **B. Rumusan masalah**

---

<sup>10</sup> Ujam Jaenudin & Tahrir, Studi Religiusitas, Budaya Sunda dan perilaku moral pada masyarakat kabupaten Bandung, Bandung : Jurnal Psikologi islam dan budaya, 2019, hlm 1-2

<sup>11</sup> Endriana Noerdin, Politik identitas perempuan aceh, 2005, Jakarta : Women Research institute, hlm 3

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kontruksi identitas keagamaan dikalangan organisasi kepemudaan di kabupaten Bandung?
2. Bagaimana persepsi organisasi kepemudaan islam terhadap pemimpin perempuan di kabupaten Bandung?
3. Bagaimana relasi antara agama dan politik identitas terhadap pemimpin perempuan bagi organisasi kepemudaan islam di Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk menganalisis dan memaparkan mengenai kontruksi Identitas keagamaan dikalangan organisasi kepemudaan di Kabupaten Bandung.
- b. Untuk menganalisis dan memaparkan mengenai persepsi organisasi kepemudaan islam terhadap pemimpin perempuan di Kabupaten Bandung.
- c. Untuk menganalisis dan memaparkan mengenai relasi antara politik identitas terhadap pemimpin perempuan bagi organisasi kepemudaan islam di Kabupaten Bandung.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat praktis yang diharapkan adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akademis sebagai bagian kajian mengenai bagaimana perspektif organisasi kepemudaan dalam

merespon isu-isu keagamaan dan politik identitas di kabupaten Bandung.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja yang berkepentingan dengan penanganan masalah yang muncul dari penggunaan isu-isu keagamaan dan politik identitas di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemuka agama dalam melaksanakan pembinaan kehidupan beragama.

## **E. Kerangka Berpikir**

### **1. Teori Fungsionalisme Struktural**

Pada konteks kehidupan beragama sehari-hari, terkadang sulit untuk membedakan antara sesuatu yang murni agama dan hasil pemikiran atau interpretasi dari agama. Sesuatu yang murni agama, berarti berasal dari Tuhan, absolut dan mengandung nilai sakralitas. Menyadari posisi penting tersebut dalam kehidupan sehari-hari, perlu kita mengkaji terhadap wajah yang ditampilkan agama dalam berbagai sudut pandang. Agama selalu menampilkan sebuah dimensi yang beragam seperti : Ritual, Doktrinal, Etika, Sosial dan eksperiensial secara sekaligus. Sehingga sangatlah wajar fenomena tentang agama dan kehidupan beragama selalu muncul dalam berbagai bentuk kajian dan forum-forum diskusi. Diskursus mengenai agama selalu dipastikan merujuk pada dua realitas yang tidak bisa dipisahkan yaitu *Pertama*, realitas yang bercorak teologis.

*Kedua*, realitas yang bercorak historis-sosiologis atau sebagai suatu fenomena kebudayaan besar (*Grand Culture*).<sup>12</sup>

Kedua realitas tersebut meniscayakan adanya relasi simbiotik-mutualistik. Karena agama secara suci dimaksudkan sebagai pegangan bagi setiap masyarakat, makna agama sendiri harus memiliki nilai kebenaran yang absolut. Nilai-nilai kebenaran yang secara relatif jelas tidak mungkin dijadikan sebagai sebuah pegangan karena hanya akan membawa manusia pada absurditas. Hal ini berhubungan dengan kurang mampunya ideologi-ideologi besar dalam menyangga eksistensi dan dinamika sejarah kemanusiaan.

Signifikansi agama sesungguhnya tidak hanya dapat dipandang semata-mata dari dimensi teologisnya. Karena akan memengaruhi proses perkembangan kehidupan manusia terutama dalam masalah humanistik, moral, etika dan estetika. Secara makro masalah keagamaan akan memengaruhi pembentukan pandangan dunia, Khususnya yang berkaitan dengan dimensi ontologis dan ia mempunyai signifikansi sosial dalam kehidupan manusia. Salah satu tokoh yang mencurahkan perhatian terhadap relasi tersebut adalah Emile Durkheim, dalam pandangan Emile Durkheim ciri penting mengenai struktur sosial adalah bahwa setiap struktur sosial selalu terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai, definisi mengenai kebudayaan dari perilaku selalu diartikan dalam setting yang berbeda-beda, masyarakat dalam hal ini mempelajari definisi normatif kemudian melalui proses tersebut anggota-anggota masyarakat menjalankan kehidupan sosial mereka. Menurut Durkheim, walaupun setiap individu dihadapkan pada pilihan-pilihan

---

<sup>12</sup> Ridwan Lubis, Sosiologi Agama : Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi sosial, 2017, Jakarta : Kencana, hlm 2

tertentu untuk berhadapan dengan orang-orang sejatinya pilihan tersebut disediakan untuk individu tersebut. Seperti kegiatan sosial lainnya, keyakinan dan praktik agama distrukturalkan oleh masyarakat dan oleh posisi orang-orang yang ada di dalamnya. hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi pandangan konsensus sosial dalam kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Bagi Durkheim, Pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat yang disebut sebagai soliditas sosial, yang dipengaruhi oleh sosialisasi yang diproses secara kolektif oleh aturan-aturan perilaku. Istilah yang dipergunakan adalah fakta sosial, Menurut fakta tersebut berada diluar dan mengendalikan setiap individu. meski tidak dapat dilihat, struktur aturan-aturan kebudayaan itu nyata bagi individu-individu yang perilakunya ditentukan oleh fakta sosial itu seperti struktur fisik dunia yang juga menghambat setiap individu. Masyarakat menurut durkheim adalah sebuah sui generis yaitu masyarakat yang memiliki eksistensinya sendiri. Durkheim adalah sosiolog yang pertama menggunakan gagasan fungsionalis. prinsip-prinsip magis imitatif barangkali bagi sebagian orang adalah sesuatu yang absurd, tapi tidak demikian halnya bagi mereka, karena magis itu menjelaskan kenapa mereka melakukan perbuatan aneh tersebut.

Fungsionalisme struktural atau struktural fungsional adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menjelaskan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian lain yang saling berhubungan. Fungsionalisme menjelaskan kondisi masyarakat secara

---

<sup>13</sup>Pip Jones; Alih Bahasa; Ahmad Fedyani Saefudin, Pengantar Teori-Teori Sosial : Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme, 2009, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 45

menyeluruh dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya terutama norma, adat, tradisi dan institusi.<sup>14</sup> Dalam Paradigma teori ini semua unsur-unsur yang membentuk masyarakat saling berhubungan satu sama lain yang dikenal dengan sistem. Sehingga jika ada salah satu unsur yang tidak berjalan maka secara otomatis komponen lain dalam hal ini masyarakat akan terganggu, unsur yang satu dengan yang lain akan saling berhubungan dan menjadi ketergantungan, menunjukkan bahwa masyarakat teintegrasi utuh dan bertahan lama.

Bagaimana berfungsinya sebuah struktur menjadi sasaran penjelasan teori struktural fungsional. Asumsi dasar teori ini menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan nilai-nilai bersama yang mampu mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan anggotanya. Sebagai mana di kutip dari Prof. Damsar, Sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen dan komponen yang terkontruksi secara relatif mantap, stabil dan hampir tidak berubah.
2. Elemen dan komponen dalam masyarakat membentuk dan menjalin hubungan yang saling mensupport satu sama lain.
3. Setiap elemen dalam struktur fungsional yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional selalu didasarkan pada suatu konsensus nilai yang berlaku ditengah-tengah anggotanya.<sup>15</sup>

Dalam kesempatan ini, penulis dari segi sosiologi bermaksud mengkaji kehidupan sosial keagamaan pemuda dan organisasi kepemudaan yang

---

<sup>14</sup> Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, Kamus sosiologi, 2012, Surakarta: Aksarra Sinergi Media, hlm 71.

<sup>15</sup> Damsar, Pengantar Teori Sosiologi, 2017, Jakarta : Kencana, hlm 165

menitikberatkan pada interaksi penggunaan identitas politik dan isu-isu keagamaan dikalangan organisasi kepemudaan di kabupaten Bandung.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pendekatan struktural fungsional yang berfokus pada agregasi umur dan intitusional kepemudaan di kabupaten Bandung. Dalam aliran struktural fungsional, agama sebagai *interplay* dominan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh fakta sosial lainnya hal tersebut merupakan ciri utama terbentuknya produk sosial, dimana individu secara otonom, dan eksternal saling mempengaruhi individu, termasuk individu pemeluk satu agama.

Menurut fungsionalisme, masyarakat terdiri atas bagian-bagian sebagaimana sebuah makhluk hidup yang satu dengan bagian lainnya yang mempunyai fungsi memelihara keutuhan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Semua unsur sosiokultural dalam masyarakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan atau prasyarat biologis, psikologis dan sosio kultural.<sup>16</sup> Fungsionalisme kontemporer yang diintrodusir secara sistematis oleh talcot parsons, berusaha untuk memasukan konsep system sebagai sesuatu yang terdiri dari atas bagian-bagian yang saling berkaitan.

Sama halnya dengan Durkheim yang berpandangan bahwa manusia bukan hanya sebagai individu *an sich*, tetapi terkait dan terikat dengan bagian lainnya seperti orang tua, sanak saudara, kota suku, partai politik, tradisi etnis atau kelompok-kelompok lainnya. Dalam pandangan Durkheim adalah tidak mungkin apabila kita menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu alami jika hanya dengan mempertimbangkan insting biologis, psikologi individu melalui

---

<sup>16</sup> Dadang Kahmad, Metode Penelitian Agama (Perspektif ilmu Perbandingan Agama) Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm 151

masyarakat dan menerangkan masyarakat dalam hubungan sosial. Dalam pola ini, pemikiran manusia pertama kali dikendalikan oleh teologi, kemudian oleh ide-ide abstrak filosofis dan akhirnya di sempurnakan oleh para positivistic atau saintifik yang telah mendominasi dunia pemikiran tahun-tahun setelahnya, dimana hanya kajian dan pengamatan mendalam menghadap fakta yang jadi kunci semua pengetahuan.

Durkheim merasa yakin bahwa perspektif sosiologis yang ia tawarkan dapat memberikan masukan-masukan baru kepada sistem politik, Pendidikan, moral dan terutama agama. Dalam kajian filsafat politik yang diberikan dalam kuliah mengenai sosialisme dan komunisme, Durkheim menggambarkan kedua paham tersebut sebagai respon terhadap kekacauan kehidupan modern dan Durkheim menolak ide perjuangan kelas dan teori kekuasaan agama.<sup>17</sup>

Fenomena keterlibatan agama dalam politik di wujudkan dengan keterlibatan berbagai symbol, actor dan *sentiment* yang berhubungan dengan agama. Fenomena ini menjadi penting dalam konteks otonomi daerah, dan pilkada sebagai strategi membangun demokrasi pada masyarakat lokal. Keterlibatan agama juga menjadi kontroversi bagi sebagian kaum agamawan, terkait keterlibatan mereka dalam politik praktis. Isu ini sudah lama menjadi wacana bagi ormas-ormas keagamaan ataupun ulama.<sup>18</sup> Di sisi lain hingar bingar kontestasi politik yang terjadi juga selalu melibatkan dasar lapisan masyarakat.

Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Yang menjadi dasar terbentuknya lapisan

---

<sup>17</sup> Danile L Palas, *Seven theories of religion*, New York : Oxford University press, yang di terjemahkan oleh Inyik ridwan muzir & M Syukuri, 2018, Yogyakarta : IRCiSoD, Hlm 169

<sup>18</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama (Potret agama dalam dinamika konflik, Pluralisme dan modernitas*, 2011, Bandung : Pustaka setia, Hlm 122-123



masyarakat yang terjadi dengan sendirinya adalah kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat dan mungkin juga harta dalam batas-batas tertentu. Secara teoritis, semua manusia memang dianggap sama dan sederajat. Akan tetapi sesuai dengan kenyataan hidupnya, hal tersebut tidaklah demikian. Perbedaan atas lapisan-lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari system sosial di masyarakat.<sup>19</sup>

## **2. Teori Politik Identitas**

Politik identitas dalam catatan sejarahnya berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas keorganisasian yang dilakukan oleh para aktivis gerakan sosial, selain itu juga berhubungan dengan keberadaannya sebagai kajian di dunia akademis. Keberhasilan perjuangan para aktivis yang terlibat dalam gerakan sosial, seperti gerakan hak-hak sipil dan gerakan perempuan, para aktivis gerakan sosial secara sadar menggunakan konsep identitas dalam perjuangan untuk keadilan sosial yang berpegang pada setidaknya dua keyakinan sebagai berikut: (1) bahwa identitas seringkali merupakan sumber daya dari pengetahuan yang sangat relevan untuk perubahan sosial, dan itu; (2) kelompok tertindas harus berada digaris terdepan untuk membebaskan nasib mereka sendiri. Dalam memandang politik sebagai “politik identitas,” para aktivis yang terlibat dalam gerakan-gerakan ini mencoba merangkum dan memperdalam pelajaran dan pengalaman yang mereka peroleh dari kaum-kaum tertindas. Bagian yang terpenting dari gerakan sosial ini adalah

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 230

keberhasilan para kaum tertindas dalam memimpin, tidak pernah secara eksklusif tetapi terutama, dan mereka telah mengubah masyarakat menjadi lebih baik.<sup>20</sup>

Dalam sisi perkembangannya yang lain ide mengenai tema politik identitas juga menjadi asumsi yang mendasari berbagai program ilmiah berbasis identitas baru yang telah berkembang dan tumbuh di hampir semua universitas dan perguruan tinggi sejak 1960 an. Mahasiswa dan aktivis intelektual yang memperjuangkan studi perempuan, studi hitam, studi Chicano<sup>21</sup>, dan program berbasis identitas lainnya.

Terlepas dari keberhasilan gerakan berbasis identitas, bagaimanapun juga kajian mengenai identitas politik telah dikritik baik dalam bidang politik maupun akademis. Para pengamat mengklaim bahwa identitas adalah konstruksi sosial dan bukan sesuatu yang terbentuk secara alami, kondisi tersebut ditandai dengan konstruksi yang di ciptakan sejak awal dan oleh karena itu tidak boleh diberi beban atau kepentingan yang begitu besar. Argumen tersebut diperkuat dengan sebuah tesis bahwa kategori ras adalah sebuah cara untuk mengkategorisasikan manusia, selanjutnya adapun mengenai perbedaan jenis kelamin sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan, bahwa seksualitas harus dianggap sebagai praktik dari pada identitas, dan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan maka hal tersebut merupakan hasil dari sebuah pengaturan sosial bukan sesuatu yang alami. Argumentasi tersebut dipergunakan untuk menunjukkan bahwa identitas adalah

---

<sup>20</sup> Linda Martin Alcoff etc, Identity Politics Reconsidered, New york, Palgrave Macmillan, 2006, Page 2

<sup>21</sup> Merupakan studi tentang pengalaman Chicana atau chicano yang mengacu pada berbagai bidang termasuk sejarah, sosiologi, seni dan sastra. Di banyak Universitas studi Chicana atau chicano dikaitkan dengan studi tentang etnis lainnya seperti studi kulit hitam, studi amerika asia dan studi amerika asli. Banyak siswa yang telah mempelajari antropologi juga telah terlibat dalam berbagai studi. di kutip dari [https://en.wikipedia.org/wiki/Chicana/o\\_studies](https://en.wikipedia.org/wiki/Chicana/o_studies). di akses pada tanggal 26 Januari 2021 di bandung pukul 10.00 wib

sebuah fiksi ideologis yang dipaksakan dan dipergunakan untuk memecah dan mengontrol populasi. Oleh karena itu, banyak kritik terhadap identitas harus dihilangkan dalam kehidupan sehari-hari yang justru dalam kenyataannya malah dilembagakan.

Hipotesis lain tentang penggunaan politik identitas yaitu *Pertama*, identitas dapat dan memang berubah. *Kedua*, Setiap penanda identitas pasti mengandung suatu bagian internal yang membuatnya tidak mungkin menetap secara koheren pada perwakilan yang pasti. Kondisi seperti itu memang wajar dialami oleh siapapun yang terlibat dalam politik identitas, dimana penanda identitas yang muncul seperti jenis kelamin, ras, seksualitas, kelas dan bangsa berusaha untuk mempertahankan dasar dari sebuah prinsip pengorganisasian fundamental untuk memposisikan sudut pandang teoritis dan strategi politik untuk mengubah hubungan kekuasaan. Politik identitas sebagian besar mengartikulasikan secara otonom dan beroperasi pada tingkat gerakan kolektif dan gerakan masa.<sup>22</sup>

Studi tentang kritik identitas lainnya adalah adanya kritik mengenai politik identitas yang keliru, penggunaannya seringkali didasarkan pada anekdot tentang sebuah peristiwa dimana kelompok tertentu menggunakan penilaian politik yang buruk daripada studi empiris tentang gerakan berbasis identitas daripada melihat efek yang ditimbulkan sebagai sebuah analisis. Hal tersebut memang dapat terjadi, karena asumsi-asumsi tersebut adalah sesuatu yang wajar dan memang layak untuk didiskusikan. Gerakan politik identitas sebagai gerakan sosial abad ke dua puluh satu membutuhkan pengistilahan yang baru. Kajian historis mengenai politik identitas merupakan kunci untuk mengurai tema politik identitas saat ini,

---

<sup>22</sup> Carolyn D Cruz, *Identity Politics in Deconstruction : Calculating with the inelcalculable*, Burlington, USA, Ashgate e-Book, page 2

baik di era gerakan pembebasan nasional anti kolonial yang besar di negara-negara jajahan, maupun era gerakan *front* persatuan yang dipimpin oleh kaum buruh atau gerakan yang dilakukan oleh kalangan minoritas yang memperjuangkan kesetaraannya. Kalangan *postmodernis* berpandangan bahwa identitas adalah sebagai kehendak bebas dan karenanya tidak dapat dipercaya. Identitas dipahami sebagai sebuah dugaan terhadap pengalaman subjektif dan lokasi sosial yang objektif. Masyarakat yang termarginalkan sering kali menggunakan pengalaman subjektif tersebut untuk mengkritik dan membuat sebuah narasi tentang dominasi dan ketertindasan yang kemudian dijadikan sebuah legitimasi terhadap pengalaman subjektif tersebut. Pengalaman subjektif tersebut sejatinya bukanlah sebuah fenomena batin yang tidak terduga atau tersembunyi, melainkan sebuah penjelasan mengenai hubungan sosial.

Dilihat dari rentang waktu, Para peneliti baru tertarik kepada isu politik identitas pada tahun 1970 an di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan termarginalisasi kemudian menjadi akumulasi perasaan teraniaya. Berangkat dari persamaan perasaan yang dirasakan atas diskriminasi tersebut selanjutnya cakupan politik identitas berkembang dan meluas kepada masalah agama, kepercayaan dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Dipertengahan dekade kedua abad ke 21, politik dunia berubah secara drastis dan dramatis. Periode dari awal 1970 an hingga pertengahan 2000 an menyaksikan apa yang disebut Samuel Huntington sebagai “gelombang ketiga” demokratisasi karena jumlah negara yang dapat dikelompokkan sebagai negara

demokrasi meningkat dari sekitar 35 menjadi lebih dari 110. Bersamaan dengan pergeseran dalam lembaga-lembaga politik ini, muncul pertumbuhan ketergantungan ekonomi diantara negara-negara atau yang kita sebut globalisasi.<sup>23</sup> Di negara-negara berkembang, jangkauan teknologi informasi menjangkau ke setiap pelosok daerah termasuk ke tiap pelosok desa dimana sebelumnya masyarakat desa yang terbatas konektivitas informasi akibat keterbatasan akses listrik dan internet kini dapat merasakan fasilitas seperti masyarakat perkotaan, menonton TV atau terhubung ke internet melalui ponsel yang kini sudah hampir dimiliki oleh setiap orang. Pergeseran tersebut tentu berdampak pada aspek-aspek kehidupan, dahulu kekuasaan berada ditangan-tangan otoritas politik sekarang kemudian kekuasaan tersebut menyebar dan bertransformasi kedalam berbagai bentuk, hal ini disebabkan karena kekuasaan tidak lagi diartikan sebagai sebuah cara untuk memaksakan kehendak kepada orang lain secara langsung, citra kekuasaan yang terus berubah berimplikasi pada identitas masyarakat, yang kini identitas tersebut tidak lagi ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut melainkan oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku atau perbuatan tersebut.

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah india dan amerika serikat, seperti negara besar lainnya Indonesia merupakan negara multi kultural dan kemajemukan yang dipersatukan dalam slogan *Unity-in-diversity*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Francis Fukuyama, *Identitas : Tuntutan atas martabat dan politik kebencian*, Bandung : PT Bentang Pustaka, 2020, hlm 2-3 Merupakan terjemahan dari *Identity : The Demand For Dignity And The Politics Of Resentment* terbitan Farrar. Straus and Giroux, 2018. Karya Francis Fukuyama.

<sup>24</sup> Unity in diversity atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua atau bhineka tunggal ika sebagai identitas bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai “ *Philosofische grondslag*” yang di bacakan dalam pidatonya tanggal 1 juni 1946 di kutip dari bukunya Ujang charda, *Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan tinggi*, Depok : Rajawali pers, hlm 27

Meskipun penduduk Indonesia tidak sebesar amerika dan india, keanekaragaman etnis, agama, ras dan budaya di Indonesia menurut banyak pengamat jauh lebih kompleks dari kedua negara tersebut. Selain sama-sama sebagai negara demokrasi terbesar di dunia serta memiliki kesamaan dalam keanekaragaman etnis, ras, agama dan budaya, politik identitas di Indonesia juga memiliki kemiripan dengan amerika dan india. Di sini politik identitas yang paling menonjol (terutama memasuki era reformasi) adalah politik identitas mayoritas (*majority identity politics*) sama seperti di dua negara demokrasi besar lainnya.<sup>25</sup> Jika di india politik identitas mayoritas di mainkan oleh para politisi hindu untuk mendulang suara umat hindu yang menjadi mayoritas di india, di amerika serikat politik identitas mayoritas berbasis kulit putih, maka di Indonesia politik identitas mayoritas di dominasi isu seputar agama islam yang dipeluk mayoritas populasi.

Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri, yang oleh Suparlan disebut juga sebagai jati diri. Masih menurut Suparlan, identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu.<sup>26</sup> Sementara Buchari dengan mengutip Jumadi mengemukakan bahwa konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu

---

<sup>25</sup> Umar suryadi bakry, *Multikulturalisme & Politik identitas dalam teori dan praktik*, Depok : Rajali Pers, 2020, hlm 222

<sup>26</sup> Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, Jakarta: KIK Press, 2004, hlm. 25.

atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.<sup>27</sup>

Peningkatan sistem demokrasi yang terus menerus dicanangkan oleh berbagai pihak dalam sistem pemerintahan di Indonesia nyatanya tidak selalu memberikan rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat. Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya berjalan secara dinamis, persoalan lain yang membuat dinamisnya pelaksanaan di Indonesia sendiri berakar pada keanekaragaman yang sering kali muncul memicu ketidakharmonisan antar kelompok bahkan di internal kelompok itu sendiri. Mengendapnya konflik antar identitas tersebut sering kita jumpai sebagai bagian dari proses demokratisasi, atau meminjam istilah yang di pakai oleh Yeni Sri Lestari yaitu Demokrasi Liar.<sup>28</sup>

Kompleksitas pertentangan antara identitas nasionalisme dan identitas agama yang semakin meruncing melahirkan berbagai isu yang mengancam dan mengganggu stabilitas negara. Isu dan propaganda yang menyebar di antara kelompok menjurus pada kebenaran identitas masing-masing sehingga mengklasifikasi kelompok menjadi kelompok pro dan kontra terhadap pemerintah.

Keterlibatan agama juga menjadi kontroversi bagi sebagian kaum agamawan, terkait keterlibatan mereka dalam politik praktis. Sebenarnya isu ini sudah lama menjadi wacana bagi ormas-ormas keagamaan ataupun ulama. Ada sejumlah ormas keagamaan yang secara struktural menyatakan keterlibatannya secara resmi

---

<sup>27</sup> Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*, Jakarta: YOI, 2014, hlm, 27

<sup>28</sup> Yeni Sri Lestari, *Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama*, dalam *Journal of Politics and Policy* Volume 1, Number 1, Desember 2018

dalam politik praktis dan menjadi kelompok utama pendukung partai tersebut. contoh ormas keagamaan Nahdhatul Ulama yang mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa. Di satu sisi juga ada ormas keagamaan yang secara formal menyatakan tidak terlibat dalam politik praktis, misalnya muhammadiyah.<sup>29</sup> Nyatanya dukungan ormas-ormas keagamaan yang kemudian ikut terlibat dalam mengkonstruksi identitas keagamaan dalam dunia politik nampak samar-samar terlihat.

Secara sosiologis, kadar keberagaman masyarakat juga memiliki pengaruh pada perilaku politik masyarakat. Dalam praktiknya, agama diapresiasi oleh masyarakat secara berbeda. Setiap masyarakat memiliki pola dan kadar keberagaman yang berbeda dengan masyarakat lain. Atas dasar itu, tipe-tipe masyarakat dan agama dapat dibedakan.

Dalam orasinya Ahmad Syafii Maarif pernah mengutarakan penggunaan isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan, merasa teraniaya.<sup>30</sup> Dalam perkembangan selanjutnya cakupan penggunaan politik identitas ini meluas secara masih dalam aspek-aspek lain seperti agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam.

Dalam sistem politik yang demokratis, watak hukum yang dihasilkan bersifat responsif dan akomodatif dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Identitas keberagaman merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin

---

<sup>29</sup> Prof. Dadang Kahmad, M.Si, Sosiologi Agama, *Ibid.* Hlm 123

<sup>30</sup> Ahmad Syafii Maarif, dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML), di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, pada 21 Oktober 2009 lalu.



dalam konstitusi bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam pasal 28E Undang-undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.”*

Oleh karena itu, Jaminan terhadap kebebasan memeluk agama sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan hilir dari dinamika sehat antara relasi agama dan politik identitas. Dengan demikian, jaminan terhadap kondisi tersebut ditandai dengan konsep *impartiality, consistency, openness, predictability, dan stability*.<sup>31</sup>

### **3. Teori Kontruksi Gender**

Agama, gender dan identitas merupakan konsep berat yang memiliki berbagai sudut pandang dan landasan ideologi tergantung sudut pandang yang dipergunakan. Manusia sebagai *homo politicus* sangat tergantung sekali oleh agenda, yang terus berjuang untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Oleh karena itu, sebuah fenomena sosial dimana manusia berada tidak mungkin melepaskan diri dari kondisi geografi, kekuatan sejarah, budaya dan politik. Penggunaan istilah gender selalu mengacu pada jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki dipisahkan secara biner atas kualitas feminim atau maskulin. Seiring dengan perkembangannya kini gender tidak lagi hanya di artikan sebagai jenis kelamin, istilah gender kemudian mendapatkan arti dan makna yang baru di tengah-tengah masyarakat, pemaknaan tersebut berpengaruh terhadap ideologi-politis yang serius dan nyata. Secara konsep, gender mewakili struktur kekuasaan

---

<sup>31</sup> Prof. A. Masyhur effendi, S.H.,M.S & Taufani S Evandari S.H.,M.H, HAM : *Dalam Dinamika/Dimenasi Hukum, Politik, Ekonomi Dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, hlm 63

dan relasi mengenai kedudukan jenis kelamin di masyarakat. Kondisi seperti itu menciptakan konfigurasi yang begitu kompleks yang kemudian harus dihadapi oleh entitas social yang terbagi dalam peran-peran gender seperti sikap politik mengenai persoalan menyangkut perempuan, perkawinan dan perceraian, posisi kepemimpinan di ruang publik, prefensi seksual, keamanan dan kesejahteraan.<sup>32</sup>

Menurut Aan Oakley Gender merupakan kontruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat. Aan oakley memberi perbedaan secara jelas mengenai gender yang bukanlah merupakan sesuatu yang masuk didalam ranah biologis. oleh karena itu, gender merupakan persoalan budaya yang berkaitan dengan bagaimana perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Gender merupakan kontruksi sosial karena sifatnya tidak universal, oleh karena itu konsep femininitas dan maskulinitas antar masyarakat dengan masyarakat lainnya pasti berbeda. Menurut Aan Oakley gender menciptakan pembagaian peran berdasarkan pandangan, nilai dan norma masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.<sup>33</sup>

#### **4. Hipotesis**

Dalam penulisan ini pembahasan mengenai agama dan politik identitas dengan penelitian yang dilakukan dikalangan organisasi kepemudaan islam terhadap persepsi pemimpin perempuan di kabupaten Bandung didasarkan pada suatu hipotesis sebagai berikut :

---

<sup>32</sup> Religion, public policy and social transformation in southeast asia : religion, identity and gender. Vol 2 (globethics. Net. 2016) diterjemahkan oleh Any Marsiyanti, penyuntin Dicky Sofjan, dengan judul Seri BUKU 2 : Agama, Gender dan Identitas (2013-2016), Yogyakarta : Indonesian Consorsium for religion studies (ICRS),Hlm 13

<sup>33</sup> Dikutip dari jurnal NUSA ; Jurnal ilmu bahasa dan sastra, dengan judul "Rekonstruksi Gender dalam Alih Wahana True Beauty(2020)" oleh Indrati Asyariri1, Eva Latifah, NUSA, Vol 16 No. 4 November 2021

1. Bahwa konstruksi Identitas keagamaan dikalangan organisasi kepemudaan islam di Kabupaten Bandung dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perbedaan mazhab (aliran) tertentu yang berbeda antara organisasi kepemudaan islam yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan mazhab ini berperan dalam memengaruhi sikap dan perilaku organisasi kepemudaan islam sebagai ekspresi keagamaan.

Identitas yang muncul sebagai ekspresi keagamaan dikalangan organisasi kepemudaan merupakan sikap khas yang muncul secara kokoh karena dikonstruksi secara sistematis dan berkelanjutan sebagai sebuah paham yang di ajarkan oleh Organisasi kemasyarakatan islam sebagai induk dari organisasi kepemudaan islam di kabupaten Bandung. Konstruksi identitas yang nampak seringkali tidak tunggal di satu sisi muncul menampilkan agama sebagai identitas namun di sisi yang lain persepsi terhadap politik mempengaruhi identitas keagamaan organisasi kepemudaan sebagai intitusi sosial keagamaan.

2. Persepsi organisasi kepemudaan islam sebagai sebuah tindakan menyusun, mengenali dan menafirkan informasi terhadap isu keagamaan yang muncul dalam kajian ini mengenai pemimpin perempuan di Kabupaten Bandung dilakukan oleh para organisasi kepemudaan islam untuk memberikan gambaran dan pemahaman mengenai status perempuan dalam konteks sosial politik yang dilihat dari kacamata keagamaan. Hasil persepsi tersebut kemudian disinyalir mempengaruhi identitas politik dikalangan organisasi kepemudaan islam di kabupaten Bandung. Momentum politik yang terjadi secara temporer disinyalir membuat

kontruksi identitas dikalangan organisasi kepemudaan terbentuk secara temporer juga, namun menurut penulis bahwa tersebut tidaklah sepenuhnya benar, karena menurut penulis isu-isu keagamaan yang muncul dalam hal ini pemimpin perempuan dalam kontestasi politik sejatinya tetap mengendap sebagai isu keagamaan ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu persepsi politik identitas dikalangan organisasi kepemudaan sejatinya terus berlangsung dan muncul berulang-ulang.

3. Relasi antara politik identitas terhadap pemimpin perempuan bagi organisasi kepemudaan islam di Kabupaten Bandung, dalam hal kepemudaan penggunaan pendekatan relasional kepemudaan sebagai transisi, identitas, aksi dan pencipta budaya persepsi politik identitas dikalangan organisasi kepemudaan islam menunjukkan hubungan timbal balik, keterikatan tersebut dapat terlihat dalam sikap aksi-reaksi organisasi kepemudaan terhadap penggunaan identitas politik dan keagamaan yang diterima sebagai sebuah informasi dan realita keagamaan disekitar organisasi kepemudaan islam di kabupaten Bandung.

## **5. Hasil penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang relevan mengkaji soal pemuda salah satunya adalah sebagai berikut :

1. Disertasi Sri Astuti Buchari, Universitas Padjajaran Bandung tahun 2007 dengan judul "*Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*" merupakan karya ilmiah tulis ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar doktor di bidang ilmu politik. Dalam disertasi tersebut menyajikan telaahan ilmiah

terhadap politik identitas etnis Dayak, termasuk persoalan marjinalisasi dan diskriminasi sebelum era otonomi daerah, dikaitkan dengan isu politik seperti multikulturisme, demokrasi dan desentralisasi serta pilkada Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007. Dalam hal ini yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis memilih lokasi di Kabupaten Bandung dan mengkaji bagaimana perspektif organisasi kepemudaan islam terhadap fenomena politik identitas yaitu stereotip kepemimpinan perempuan dalam kontestasi politik sedangkan disertasi Sri Astuti lokasi penelitian di Kalimantan barat dan menelaah fenomena politik identitas khususnya yang berhubungan dengan etnis atau kesukuan Dayak dalam ranah kontestasi politik.

2. *A Quest For True Islam A Study Of The Islamic Resurgence Movement Among The Youth In Bandung*, Indonesia, Rifki Rosad, Department of archeology and antropologi faculty of arts, Februari 1995. yang mengkaji gerakan kebangkitan islam yang dilakukan oleh para pemuda di kota bandung, yang berfokus pada gerakan kepemudaan yang kembali ke islam dan yang dikembangkan oleh para mahasiswa. Bagaimana komunitas-komunitas islam merespon keadaan sosial, politik dan perubahan kebudayaan.

Dalam hal ini yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bahwa peneliti memfokuskan penelitian terhadap respon atau persepsi organisasi kepemudaan islam terhadap pemimpin perempuan di

kabupaten Bandung dan relasinya dengan konstruksi politik identitas dikalangan kepemudaannya.

3. Disertasi, Leni Winarni dengan Judul *Konstruksi Politik Identitas Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia (1998-2019)* tahun 2020, Sekolah pascasarjana Inter religious studies Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU memosisikan sebagai kekuatan Islam yang netral politik dengan beragam dalil keagamaan dan dasar-dasar pemahaman keagamaannya masing-masing. Semangat tersebut dalam perspektif konstruktivisme sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan (pemaknaan) yang kemudian diwujudkan melalui wacana-wacana yang lekat dengan identitas mereka melalui berbagai dokumen resmi maupun berbagai statement para tokoh dan elitnya. Penelitian ini tidak hanya menfokuskan pada mengapa politik Muhammadiyah dan NU yang berbasis identitas mereka terjadi, namun berupaya menggali lebih jauh tentang bagaimana proses pembentukan politik identitas tersebut dikonstruksikan selama Reformasi, terutama terkait dengan wacana-wacana keduanya yang terkait dengan demokrasi, nasionalisme, dan radikalisme Islam. Berpijak dari fakta-fakta historis baik sebelum maupun selama Reformasi serta peristiwa-peristiwa faktual dan aktual yang berkaitan dengan Muhammadiyah dan NU, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa proses konstruksi politik identitas tidak pernah berhenti dan akan terus bertransformasi, bersamaan dengan evolusi identitas mereka. Bahwa yang membedakan tulisan ini dengan tulisan

yang dibuat penulis adalah objek penelitian yang berbeda, bahwa objek penelitian penulis adalah Organisasi Kepemudaan islam sebagai sayap organisasi atau underbow Organisasi Kemasyarakatan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain.

4. Tesis Ahmad walij, *Pola Politik Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (Jai) Di Kota Bandung*), Magister Ilmu Sosial Dan Politik : Bandung., 2014 Penelitian ini mendeskripsikan pola politik identitas yang dijalankan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kota Bandung guna mempertahankan eksistensinya sebagai kelompok minoritas dalam beragama. Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena Bandung merupakan ibu kota propinsi dimana secara politik pemerintahan akan menjadi tolak ukur mengenai kebijakan tentang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Propinsi Jawa Barat. Dalam hal ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahwa objek penelitian penulis adalah Organisasi kepemudaan islam dalam merespon penggunaan politik identitas yang meletakkan perbedaan gender sebagai faktor pembeda untuk mendeskriditkan kelompok minoritas perempuan dalam kontestasi politik.
5. Arus Reka Prasetia, *Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu*. Penelitian ini Politik identitas sebenarnya baik dan dapat dimainkan demi terciptanya ekualitas bagi semua warga negara agar tiap individu memiliki kesempatan yang sama di semua bidang, baik pendidikan, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Sebab pada realitasnya, masih terjadi dikotomi

antara mayoritas dan minoritas, maka kerap terjadi diskriminasi, yang mana identitas inheren menjadi faktor utama guna mengurangi peluang. Padahal, konstitusi mengamanatkan inklusivitas.

6. Konstruksi Politik Identitas Melalui Nilai-Nilai Islam Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat oleh Dian Herdiana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Cimahi dalam Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 15 (2) 2019 253-274 dalam jurnal tersebut penelitian di fokuskan pada kontestasi politik pemilihan kepala desa di kabupaten bandung barat dimana setiap kontestan menggunakan nilai-nilai islam sebagai identitas politiknya untuk menggambarkan bagaimana politik identitas, mengkontruksikannya melalui simbol-simbol pribadi, kemudian dikonstruksikan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian, syukuran atau kegiatan serupa lainnya. Dalam hal ini penulis melihat perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis, bahwa penulis dalam hal ini memfokuskan locus penelitian di Kabupaten Bandung kemudian mengkaji permasalahan terkait persepsi Organisasi kepemudaan islam yang ada di kabupaten bandung terhadap agama dan politik identitas khususnya bagaimana kepemimpinan perempuan.
7. Tesis dengan judul Perempuan Dan Politik (Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep Periode 2014-2019) oleh Hairul Anwar pada program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun



2018 dalam tulisan tersebut membahas mengenai keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif di kabupaten sumenep dalam penulisan tersebut nampak terlihat fokus penelitian dilakukan dengan mengkaji hambatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini bahwa peneliti tidak hanya berfokus pada konteks politik sebagai unsur hambatan keterlibatan perempuan dalam ruang-ruang publik melainkan aspek yang mengkonstruksi politik identitas di kalangan organisasi kepemudaan di kabupaten bandung terhadap stereotip kepemimpinan perempuan.

8. Jurnal dengan judul STEREOTIP KEPEMIMPINAN PUBLIK PEREMPUAN PADA DUNIA POLITIK (Studi Deskriptif di Kabupaten Jember) oleh Danik Eka Rahmaningtyas, Iin Ervina Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember dalam tulisan ini membahas mengenai stereotip kepemimpinan publik perempuan di kabupaten Jember, tulisan ini memfokuskan penelitian pada stereotip sebagai keyakinan seseorang atau kelompok tentang atribut pribadi di kelompok
9. sosial dengan menggambarkan stereotip kepemimpinan publik perempuan di bidang politik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi stereotip tersebut. Perbedaan penulis dengan tulisan ini adalah bahwa penulis lebih memfokuskan pada persepsi organisasi kepemudaan terhadap kepemimpinan perempuan oleh organisasi kepemudaan islam di kabupaten bandung sehingga didapatkan sebuah hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi politik

identitas di kalangan organisasi kepemudaan islam di kabupaten Bandung.

